



Perilaku Politik Mahasiswa dan Generasi Muda

Khoirul Huda¹, Thorino Ivan Doloksaribu², Syarif Hasayangan Siregar³

¹Program Studi Pemikiran Politik Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

²Program Studi Pemikiran Politik Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

³Program Studi Pemikiran Politik Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: khoirulhuda@uinsu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received October 30, 2024

Revised November 10, 2024

Accepted November 30, 2024

Available online December 10, 2024

Kata Kunci:

Bonus Demografi; Literasi Politik;
Dinamika Politik Mahasiswa

Keywords:

Demographic Bonus; Political Literacy;
Student Political Dynamics



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan
Sagita Akademia Maju..

ABSTRAK

Generasi muda sering disebut sebagai cikal bakal penerus bangsa. Kaum muda sangat dibutuhkan bagi kemakmuran bangsa karena diharapkan para kaum muda ini mempunyai ide-ide kreatif untuk bisa merubah bangsa menjadi lebih baik. Indonesia disebut sedang memasuki fase bonus demografi, dimana peringkat populasi yang tinggi berada pada rentang usia produktif. Hal ini bisa menjadi keuntungan bagi Negara, tetapi bisa juga menjadi tantangan yang berat. Perilaku politik mahasiswa dan generasi muda saat ini menunjukkan adanya ketertarikan terhadap isu-isu politik, namun disisi lain, tantangan yang dihadapi adalah rendahnya tingkat literasi politik. Rendahnya pemahaman mahasiswa tentang kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan dinamika politik global sering kali menyebabkan tindakan politik yang kurang berdasar dan hanya ikut-ikutan saja. Oleh sebab itu dalam penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai isu-isu gerakan politik mahasiswa dan menganalisis perubahan yang terjadi dalam gerakan politik mahasiswa dari masa ke masa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, dimana data sekunder dikumpulkan melalui jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, dan sumber online terpercaya terkait perilaku politik mahasiswa dan generasi muda. Hasil yang didapat dari penelitian ini berupa dinamika gerakan politik mahasiswa dan generasi muda dimulai dari sejak zaman

kemerdekaan hingga saat ini. Dinamika gerakan politik mahasiswa dan generasi muda di Indonesia yang telah berlangsung sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini memperlihatkan adanya perubahan dalam posisi mahasiswa dalam berpolitik dan kekhawatiran akan mundurnya kualitas politik mahasiswa dan generasi muda.

ABSTRACT

The younger generation is often referred to as the forerunners of the nation's successors. Young people are really needed for the prosperity of the nation because it is hoped that these young people will have creative ideas to change the nation for the better. Indonesia is said to be entering the demographic bonus phase, where the population with a high ranking is in the productive age range. This can be an advantage for the State, but it can also be a serious challenge. The current political behavior of students and the younger generation shows an interest in political issues, but on the other hand, the challenge faced is the low level of political literacy. Students' low understanding of public policy, governance and global political dynamics often results in political actions that are unfounded and just go along with it. Therefore, this writing aims to explain various issues in student political movements and analyze the changes that have occurred in student political movements from time to time. The method used in this research is a qualitative approach with a literature study method, where secondary data is collected through scientific journals, books, official reports and trusted online sources related to the political behavior of students and the younger generation. The results obtained from this research are the dynamics of student and young generation political movements starting from the era of independence until now. The dynamics of the political

movement of students and the younger generation in Indonesia which has been going on since independence until now shows a change in the position of students in politics and concern about the decline in the political quality of students and the younger generation.

1. PENDAHULUAN

Dalam catatan sejarah Indonesia peran mahasiswa dan generasi muda sangat menentukan keberhasilan serta kemajuan bangsa Indonesia. Dalam bidang politik mahasiswa sebagai pasukan terdepan yang membawa Indonesia menuju kemerdekaan. Mahasiswa dan generasi muda selalu memiliki peran penting dalam sejarah politik Indonesia. Pada masa menjelang kemerdekaan, kelompok pemuda mendorong Soekarno dan Moh. Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, menunjukkan betapa kuatnya tekad mereka dalam memperjuangkan kebebasan bangsa ini. Dinamika gerakan politik mahasiswa sangat penting untuk dibahas. Indonesia saat ini tercatat sedang memasuki fase bonus demografi dimana berdasarkan data statistik yang tercatat dari Badan Pusat Statistik usia produktif di Indonesia mendominasi hingga 69,68% dari total penduduk Indonesia, dan dari total tersebut 27,94% Gen-Z atau generasi muda mendominasi usia produktif dibanding dengan rival usia lainnya.

Jika dilihat dari angka produktif tersebut seharusnya Indonesia saat ini sudah menjadi Negara maju jika generasi mudanya benar-benar terlatih dan memiliki kompetensi yang baik. Namun jika dianalisis dinamika gerakan mahasiswa dan generasi muda terkhusus dalam bidang politik dimulai dari masa menjelang kemerdekaan Indonesia hingga saat ini, terdapat banyak hal urgensi yang perlu dibahas dan dikoreksi. Perilaku politik mahasiswa dan generasi muda saat ini menunjukkan adanya darurat terhadap literasi politik. Banyak dari mereka terlibat dalam aksi politik tanpa pemahaman yang mendalam, lebih sering ikut-ikutan tanpa sikap kritis. Hal ini menjadi kekhawatiran besar karena literasi politik yang rendah dapat menghambat mahasiswa untuk mengambil peran signifikan sebagai agen perubahan dalam dinamika politik di Indonesia.

Mengingat sejarah yang terjadi menunjukkan betapa pentingnya peran mahasiswa dalam dinamika politik, terlebih lagi dengan isu politik yang semakin memuncak belakangan ini memperkuat kebutuhan bangsa terhadap peran aktif dari mahasiswa. Oleh sebab itu banyak penelitian yang mencoba menjelaskan sejarah dinamika politik mahasiswa dari masa ke masa dan perkembangan serta kemunduran yang terjadi terhadap perilaku politik mahasiswa saat ini. Generasi muda telah menunjukkan peran strategisnya dalam berbagai momentum penting Indonesia. Salah satu contohnya peristiwa Rengasdengklok, di mana kelompok pemuda mendorong Soekarno dan Moh. Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Strategi kaum muda dalam peristiwa ini menunjukkan kemampuan mereka untuk bertindak sebagai motor perubahan politik yang signifikan (Abda' u, 2022).

Terlihat lagi peran aktif Mahasiswa yang turun kelapangan mendemonstrasikan hak mereka didepan gedung DPR RI dalam meruntuhkan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang sering terjadi pada masa pemerintahan Soeharto, serta mengakhiri masa Orde Baru(Ester Indahyani Jusuf, Hotma Timbul, Olisias Gultom, 2007).

Menelusuri aksi 1998 menunjukkan aksi mahasiswa sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan serta membuktikan bahwa mahasiswa dan generasi muda bisa menjadi agen perubahan. Mahasiswa sebagai *icon* bonus demografi diharapkan bisa memiliki peluang untuk bisa menjadi masyarakat yang berintelektual dan mampu membawa Indonesia mencapai masa kejayaan (Yulistiyono et al., 2021). Dalam hal ini membuktikan kemajuan yang terjadi pada gerakan politik mahasiswa ditandai dengan kualitas pemikiran mereka sebagai peluang bangsa ini.

Jika mahasiswa tidak mampu memiliki kapasitas seorang pemikir yang baik hal ini bisa menjadikan bonus demografi sebagai ancaman bagi Negara. Namun dari hasil analisis beberapa studi menunjukkan ada perkembangan yang terjadi pada mahasiswa saat ini, yaitu dengan semakin luasnya ruang untuk berdiskusi yang disebut sebagai politik digitalisasi atau demokrasi digital (Agustina, 2014). Hasil analisis studi lain juga menjelaskan ada bentuk kemunduran dari partisipasi politik generasi muda saat ini yaitu adanya gerakan politik uang yang terjadi, dimana banyak masyarakat seperti generasi muda di iming-imingin uang untuk menjadi tim sukses dalam ajang kontestasi politik hal ini sudah menjadi kebiasaan dilingkungan masyarakat dengan alasan kebutuhan pangan, strategi yang melanggar ini telah menjadi budaya politik serta tanda kemunduran dari rasionalitas gerakan politik generasi muda saat ini (Lampus et al., 2022).

Kemunduran lainnya juga banyak dibahas dalam beberapa studi seperti ketidakpedulian anak muda terhadap pemimpin yang akan dipilih. Dengan alasan yang tidak logis, banyak juga opini bahwa siapapun pemimpinnya tidak mempengaruhi kualitas hidupnya, karena mereka beranggapan uang dan hal lainnya itu dihasilkan dari kerja kerasnya sendiri bukan dari seseorang yang menjadi pemimpin disuatu negara, atau hal ini disebut sebagai aksi Golput yang banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat Indonesia terkhusus anak muda, tingkatan literasi politik yang menurun juga menjadi penyebab terjadinya berbagai kemunduran dari gerakan politik mahasiswa dan generasi muda (Rojaby, 2018). Dengan tantangan ini mengakibatkan banyak mahasiswa yang melakukan aksi politik tanpa ada persiapan atau pemahaman yang baik terkait untuk apa mereka melakukan aksi tersebut (Pakpahan et al., 2024).

Penelitian terdahulu mengenai gerakan mahasiswa sering kali terbatas pada satu isu atau periode tertentu dalam sejarah politik Indonesia. Sebagian besar studi sebelumnya lebih fokus pada peran mahasiswa dalam satu titik waktu, seperti gerakan mahasiswa pada masa Orde Baru tahun 1998. Misalnya, penelitian oleh Friskha et al. (2007) hanya membahas peran mahasiswa dalam mendukung kemerdekaan Indonesia pada periode tertentu tanpa mempertimbangkan bagaimana dinamika tersebut berkembang seiring waktu. Penelitian lainnya lebih menyoroti dampak peristiwa tertentu terhadap pola pikir dan aksi mahasiswa dalam satu dekade terakhir. Kelemahan utama dari pendekatan-pendekatan ini adalah keterbatasan dalam memahami evolusi atau perubahan strategi gerakan mahasiswa yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial, politik, dan teknologi dari waktu ke waktu.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada analisis yang lebih holistik dan dinamis, dengan mengkaji berbagai isu yang berkembang dan mempengaruhi gerakan mahasiswa Indonesia dari masa ke masa. Penelitian ini tidak hanya membahas peran mahasiswa dalam satu periode atau dalam satu isu tertentu,

tetapi juga mengeksplorasi perubahan strategi yang diambil oleh mahasiswa dalam merespons dinamika politik dan sosial di Indonesia, mulai dari masa menjelang kemerdekaan, Orde Baru, hingga generasi mahasiswa saat ini. Pendekatan ini penting karena gerakan mahasiswa tidak pernah bersifat statis, melainkan selalu berkembang seiring dengan pengaruh sosial dan teknologi, serta tantangan politik yang dihadapi negara.

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah memberikan perspektif baru mengenai bagaimana gerakan mahasiswa beradaptasi dengan perubahan zaman dan peran mereka dalam mempengaruhi arah politik Indonesia. Dengan mengkaji berbagai isu seperti digitalisasi, keterlibatan dalam isu politik, dan tuntutan sosial yang terus berkembang, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam kajian sebelumnya yang hanya berfokus pada satu aspek saja. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan penelitian untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika gerakan mahasiswa yang mencakup faktor-faktor yang lebih luas, baik dari segi politik maupun sosial.

Dalam penelitian ini akan membahas sejarah politik mahasiswa dimulai dari masa menjelang kemerdekaan yaitu dimana kaum muda masa itu melakukan gerakan politik untuk menculik Soekarno dan Moh. Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dilanjut dengan gerakan mahasiswa pada masa penurunan Soeharto dan mengakhiri era Orde Baru. Dan yang terakhir dalam penelitian ini akan membahas gerakan politik mahasiswa saat ini baik dari perkembangannya beserta dengan peluang dan kemundurannya disertai tantangannya, dengan menjelaskan beberapa poin penting yang akan dibahas dari segi perkembangan dan kemunduran yang terjadi pada politik mahasiswa dan generasi muda seperti; politik digitalisasi sebagai kemajuan gerakan politik saat ini dan yang menjadi bentuk kemundurannya adalah bentuk ketidakpedulian mahasiswa terhadap calon pemimpin, gerakan politik uang, dan tragedi *fear of Missing out* (FOMO) (*Generasi Muda Dan FOMO Politik: Kekuatan Baru Untuk Bersuara*, 2024). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengurai kembali catatan sejarah gerakan mahasiswa dimulai dari menjelang masa kemerdekaan Indonesia hingga saat ini, serta memberikan hasil analisis tentang dinamika gerakan politik mahasiswa dan generasi muda, dengan mendeskripsikan perubahan yang terjadi dalam gerakan politik mahasiswa dari masa ke masa.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis dinamika gerakan mahasiswa di Indonesia dari masa ke masa. Dalam pendekatan ini, data yang digunakan diperoleh melalui kajian terhadap berbagai sumber sekunder, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, serta artikel berita dan media yang relevan dengan topik yang diteliti (Raco, 2010). Metode studi literatur ini dipilih karena memungkinkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang kompleks dan telah banyak dibahas dalam kajian-kajian sebelumnya, tanpa perlu melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara atau observasi lapangan.

1. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini berupa literatur yang mencakup:

- a) Buku yang membahas sejarah gerakan mahasiswa Indonesia, peran mereka dalam politik, serta faktor-faktor sosial-politik yang mempengaruhi dinamika tersebut.
- b) Artikel jurnal yang relevan dengan analisis gerakan mahasiswa di berbagai periode, baik pada masa Orde Baru, Reformasi, maupun saat ini.
- c) Artikel berita yang dapat memberikan wawasan terkini tentang peran mahasiswa dalam isu-isu politik kontemporer, yang dipublikasikan oleh sumber-sumber terpercaya seperti Kompas, Tempo, dan CNBC.
- d) Laporan penelitian yang terkait dengan dinamika gerakan politik mahasiswa baik dari kemajuan maupun kemundurannya.

2. Prosedur Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan memilih literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber yang dipilih didasarkan pada kredibilitasnya serta relevansi dengan isu yang sedang dibahas. Selama proses pengumpulan data, peneliti secara sistematis menilai kualitas dan kontribusi setiap sumber yang didapatkan, dengan mempertimbangkan banyak hal seperti historis, politik, dan sosial yang terkait dengan gerakan mahasiswa Indonesia.

3. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis), di mana peneliti mengidentifikasi pola, tema, dan tren yang muncul dalam studi terdahulu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami pemahaman yang lebih luas mengenai perubahan dalam gerakan mahasiswa Indonesia, serta peran mereka dalam menghadapi isu-isu politik yang berkembang. Analisis akan dilakukan dengan cara:

- a) Mengidentifikasi tema utama yang muncul dalam literatur, seperti peran mahasiswa dalam perjuangan politik, dampak sosial dari gerakan mahasiswa, serta perubahan strategi gerakan mahasiswa dari masa ke masa.
- b) Membandingkan dan mengontraskan berbagai pandangan yang ada dalam literatur mengenai dinamika gerakan mahasiswa, baik yang bersifat teoretis maupun yang lebih praktis, serta bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dalam konteks politik Indonesia.
- c) Menganalisis hubungan antara peristiwa-peristiwa kunci dalam sejarah Indonesia dan perubahan pola gerakan mahasiswa, untuk memahami bagaimana mahasiswa merespons berbagai tantangan yang ada.

4. Keabsahan dan Keandalan Data

Untuk memastikan keabsahan dan keandalan data, penelitian ini mengutamakan penggunaan sumber-sumber yang telah teruji kredibilitasnya. Selain itu, peneliti akan memeriksa silang antara berbagai sumber untuk memastikan bahwa data yang digunakan konsisten dan relevan dengan tujuan penelitian. Keandalan juga dijaga dengan cara memprioritaskan sumber yang telah melalui proses verifikasi dan peer review, terutama untuk artikel jurnal yang digunakan.

5. Keterbatasan Penelitian

Sebagai penelitian yang menggunakan studi literatur, terdapat keterbatasan dalam hal pengumpulan data primer yang dapat mempengaruhi kedalaman analisis. Data yang digunakan terbatas pada apa yang sudah dipublikasikan oleh peneliti

sebelumnya, sehingga peneliti tidak dapat secara langsung mengamati atau berinteraksi dengan objek penelitian. Selain itu, meskipun penelitian ini mencoba mencakup berbagai periode, variasi interpretasi yang muncul dalam literatur dapat mempengaruhi cara analisis dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis

Partisipasi Politik Mahasiswa Dan Generasi Muda

Berdasarkan studi literatur yang dilakukan melalui data sekunder seperti buku, artikel jurnal, artikel berita serta laporan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik mahasiswa dan generasi muda Indonesia sangat berpengaruh bagi kemajuan Negara ini, telah tercatat dalam sejarah dimana para kaum muda melakukan aksi penculikan tokoh penting Indonesia yaitu Soekarno dan Moh. Hatta sebagai bentuk dorongan dan usaha tegas agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menjauhkan kedua tokoh tersebut agar tidak terinterpretasikan oleh penjajah yaitu Jepang. Tekad dari generasi muda tersebutlah yang membawa bangsa Indonesia bebas dari penjajahan yang begitu panjang.

Pada akhir era Orde Baru, Partisipasi politik kembali terjadi dimana banyak aktivis dari setiap universitas turun kelapangan dan melakukan demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk gerakan demokrasi dan penolakan terhadap pemerintahan Soeharto yang terdeteksi banyak terjadi praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang dilakukan pada masa itu. Dengan partisipasi yang ditunjukkan oleh mahasiswa memberikan hasil dimana mundurnya Soeharto dari jabatannya, mengakhiri era Orde Baru dan masuknya Reformasi, membuat demokrasi dan keadaan politik Indonesia mulai membaik.

Masuk pada zaman digitalisasi sekarang ini, memberikan jalan baru terhadap partisipasi politik mahasiswa. Perluasan akses untuk mendapatkan informasi memberikan ruang yang lebih fleksibel kepada mahasiswa untuk melakukan partisipasi politiknya seperti melakukan diskusi politik tanpa ada batasan waktu dan tempat. Hal ini menjadi kemajuan yang bisa meningkatkan lagi peran aktif mahasiswa dan generasi muda dalam partisipasinya terhadap isu politik di Indonesia.

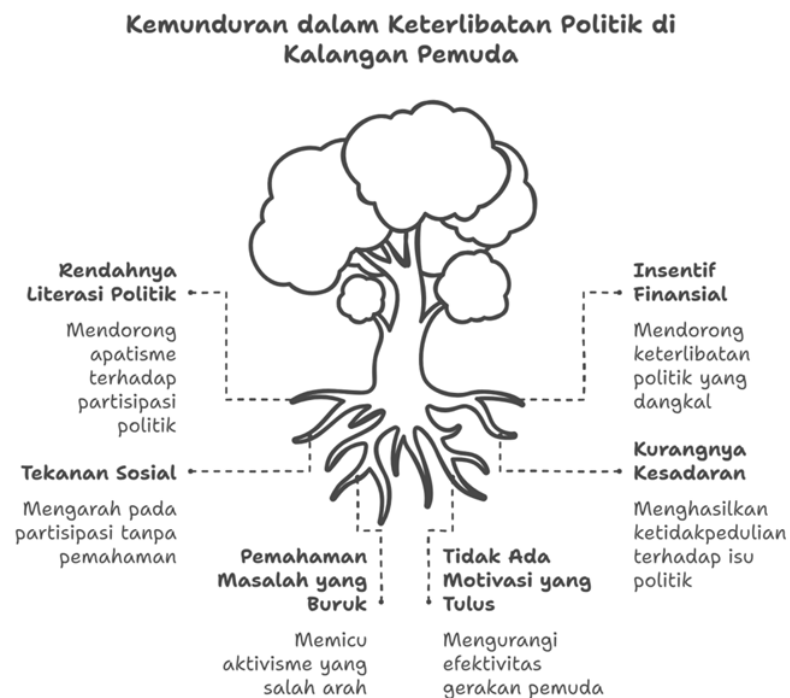


Gambar 1. Visualisasi Grafis Partisipasi Politik Mahasiswa Dan Generasi Muda

Kemunduran Gerakan Politik Mahasiswa Dan Generasi Muda

Berdasarkan hasil *research* yang telah dilakukan melalui analisis terkait dinamika gerakan politik mahasiswa dan generasi muda, maka didapatkanlah hasil bahwa pemilu serentak tahun 2024 generasi muda mendominasi angka Golput pada kontestasi politik tersebut. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya literasi atau kepedulian mahasiswa terhadap politik di Indonesia. Sikap apatisme ini menunjukkan kemunduran yang terjadi terhadap gerakan politik mahasiswa dan generasi muda.

Ditambah lagi dengan banyaknya gerakan politik yang didasarkan oleh uang, mahasiswa menjadi target utama bagi para calon yang akan dipilih agar mahasiswa menjadi tim sukses untuk mereka. Aksi demonstrasi yang seharusnya bergerak atas dasar argumen dan pemahamannya terhadap isu politik yang diangkat berbanding terbalik dimana mahasiswa dan generasi muda melakukan aksi demonstrasi atas dasar iming-imingan uang. Dengan kurangnya pemahaman mahasiswa dan generasi muda terhadap isu politik mengakibatkan terjadinya tragedi politik *fear of missing out*(FOMO) dimana mahasiswa ikut turun kelapangan hanya sebagai tuntunan sosial bukan berdasarkan atas pemahaman politik yang baik. Hal-hal inilah yang menjadi kemunduran dari gerakan politik mahasiswa saat ini dan akan semakin memburuk jika literasi politik mahasiswa tidak segera diperbaiki.



Gambar 2. Visualisasi Grafis Kemunduran Dalam Keterlibatan Politik Di Kalangan Pemuda

Diskusi

Gerakan Politik Kaum Muda 1945

Kaum muda telah menjadi actor penting dalam gerakan politik generasi muda di Indonesia, terutama ketika bangsa ini sedang menghadapi masa yang begitu genting sehingga membutuhkan keberanian dan tekad yang kuat untuk bertindak. Peran kaum muda tidak hanya tertuangkan dari semangat Nasionalisme yang menggelora, tetapi juga dari inisiatif dan strategi gerakan politik yang berani. Salah

satu catatan sejarah yang paling berkesan adalah keterlibatan kaum muda dalam proses proklamasi kemerdekaan, di mana kaum muda mengambil langkah untuk mendorong agar segera mempercepat deklarasi kemerdekaan Indonesia. Tekad mereka mencerminkan keyakinan bahwa masa depan bangsa tidak bisa ditunda, bahkan di tengah situasi politik global yang penuh ketidakpastian (Lutfi & Nurjaman, 2022).

Mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat dibuat oleh Presiden Truman dan Perdana Menteri Attle pada tanggal 14 Agustus 1945, di hadapan seluruh dunia. Pidato Kaisar Hirohito yang memaksa Jepang agar segera menghentikan perlawanannya juga disiarkan oleh Radio Tokyo, yang jelas didengarkan oleh semua petinggi Jepang di Asia Timur Raya. Soekarno dan Moh. Hatta dikabarkan oleh Sutan Syahrir bahwa Jepang telah menyerahkan diri dan tunduk kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Atas nama rakyat Indonesia, Sutan Syahrir memohon agar Soekarno agar segera memproklamasika kemerdekaan di depan radio dan tidak menunggu panitia yang telah disusun oleh Jepang. untuk menghilangkan mitos bahwa Jepang adalah sumber Republik. Soekarno menolak permohonan Sutan Syahrir, Soekarno merasa harus mencari Gunseikanbu (yaitu kantor pusat pemerintahan militer Jepang) untuk informasi tentang berita kapitulasi karena dia yakin dia masih terikat dengan komite yang dipimpinya.

Sedangkan Moh. Hatta sedang menyusun naskah proklamasi pada tanggal 15 Agustus 1945, untuk dikirimkan kepada panitia penyelenggara pada esok hari. Di bawah pimpinan Chaerul Saleh, para pemuda revolusioner termasuk mahasiswa kedokteran sekolah menengah bertemu di suatu tempat di Pegangsaan pada hari yang sama untuk membicarakan sikap dan perbuatan. Mereka memiliki argumen yang sama bahwa kaum muda harus mendeklarasikan kemerdekaan pada hari itu juga untuk menyingkirkan Jepang dan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak boleh ada campur tangan negara lain.

Wikana dan Darwis mereka adalah dua pemuda yang bertemu dengan Soekarno dan Moh. Hatta untuk diskusi. Namun setelah disambut di Pegangsaan Timur No. 56, Soekarno merasa perlu mendapat konfirmasi dari Jepang atas penyerahan yang sudah diumumkan itu. Dalam hal pelaksanaan kemerdekaan, Soekarno menggarisbawahi bahwa praktis semuanya sudah siap hanya menunggu saat yang tepat. Karena kontakannya yang terus-menerus dengan Jepang mengenai proklamasi kemerdekaan, Soekarno masih belum bisa tegas. Selain itu, masih penting untuk bernegosiasi terlebih dahulu dengan para pemimpin yang lain. Debat Muhammad Hatta dan yang lainnya tidak jauh berbeda dengan Soekarno, yang terus menekankan pentingnya berhubungan terlebih dahulu dengan pihak resmi, terutama Gunsekanbu. Sokarno dan Muhammad Hatta serta ormas-ormas mapan lainnya tidak bisa dipaksakan untuk segera mengumumkannya ke publik (Innaman, 2019).

Upaya kaum muda untuk menemui Soekarno-Hatta dan yang lainnya gagal. Sehingga gagal pula mendeklarasikan kemerdekaan sesegera mungkin, hal ini diberitahukan kepada para kaum muda yang lain. Sehingga kaum muda kembali mengadakan diskusi di Cikini pada tengah malam, kali ini dengan partisipasi perwakilan dari beberapa organisasi. Akhirnya, pertemuan tersebut sampai pada kesimpulan bahwa rakyatlah yang memproklamasikan kemerdekaannya sebelum

Jepang. Kaum muda tersebut memutuskan bahwa Soekarno dan Muhammad Hatta perlu dibawa kembali ke dalam kota meskipun banyak risiko yang harus diambil.

Sukarni, Chaerul Shaleh, dan Dokter Muwardi membangunkan Soekarno dan Muhammad Hatta sekitar pukul empat pagi dan memberi tahu bahwa situasi telah mencapai pada titik krisis artinya rakyat sedang bersemangat, Belanda dan Jepang juga bersiap-siap. Jika dua pemimpin terus di kota, itu tidak bisa lagi dimintai pertanggungjawaban. Maka dengan bantuan Pembela Tanah Air (PETA), Sukarni mengangkut Soekarno dan Muhammad Hatta beserta keluarganya ke Rengasdengklok. Sukarni dan kaum muda lainnya memohon agar Soekarno-Hatta segera mengeluarkan proklamasi setelah anak-anak muda Jakarta selesai mendesainnya. Sedangkan Soekarno dan Muhammad Hatta, sebaliknya, ketika langkah itu dilakukan maka akan membahayakan keselamatan mereka sendiri karena mereka menolak diganggu dan lebih berpegang pada perhitungan dan rancangan mereka sendiri.

Seorang anggota kelompok muda bernama Yusuf Kunto bertolak ke Jakarta untuk memberitahu teman-temannya tentang apa yang sudah terjadi di Rengasdengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, dua pertemuan diadakan di Jakarta pada pagi hari. Itu adalah kesempatan bagi kelompok lama dan kelompok baru untuk berkumpul. Soekarno-Hatta masih berada di Rengasdengklok pada saat berlangsungnya konferensi lansia di Pejambon yang melibatkan anggota panitia persiapan kemerdekaan. Kebun binatang itu menjadi tempat berkumpulnya kelompok pemuda tersebut. Setelah pertemuan itu, para pemuda dan perwakilan dari jajaran rakyat, termasuk perintis, seinendan, dan PETA, memutuskan untuk merebut ibu kota.

Rencana kelompok pemuda yang mereka laksanakan, menyerukan pembagian kerja. Petugas PETA akan bertanggung jawab, dan tentara PETA akan menjadi yang menyerang. Angkatan bersenjata pemuda Jakarta memiliki tim yang kecil dibandingkan dengan Jepang pada waktu itu karena hanya ada kompilator di sana. Di pinggiran kota, PETA sudah mempersiapkan siswa yang sudah menerima pelatihan militer untuk bertindak sebagai personel cadangan. Ormas dan organisasi pemuda akan menggerakkan Barisan Rakyat untuk mendukung tentara. Barak atau markas tentara Jepang adalah tempat pertama yang diperiksa. Asrama mahasiswa Prapatan 10 itu ditempati Komando Pemuda, sedangkan stasiun radio akan diambil alih dan deklarasi akan disiarkan pada 17 Agustus 1945, pukul 01:00, ketika gerakan itu dapat digagalkan, strategi tersebut gagal karena beberapa alasan, termasuk kesulitan dalam mempersiapkan gerakan yang sedemikian signifikan dan fakta bahwa anggota PETA merupakan kekuatan tempur dan kepemimpinan gerakan sementara kaum muda revolusioner mengambil inisiatif dan memimpin gerakan secara umum (Lutfi & Nurjaman, 2022).

Akibatnya, keseriusan fisik dan mental perencanaan dan pelaksanaan tidak terpenuhi. PETA tidak bisa didorong seperti itu, dan pemimpin lain masih menunggu arahan Soekarno-Hatta. Selain itu, pemuda-pemuda itu bersikeras untuk mengumumkan proklamasi pada malam 16-17 Agustus 1945. Namun, begitu pemuda Rengasdengklok itu membawa laporan dari sana, ada juga rencana lain, yaitu rencana anggota angkatan laut, badan rahasia di bawah arahan Subarjo. Untuk menemui Soekarno-Hatta, Subarjo sudah berangkat sore hari menuju Rengasdengklok. Subarjo

dan Sukarni serta kaum muda lainnya terlibat cekcok karena diyakini Jepang yang memerintahkan Subarjo ke sana.

Pada akhirnya, Subarjo dan sekutunya berhasil membujuk Sukarni dan sekutunya untuk membebaskan Soekarno-Hatta dan mengizinkannya melakukan perjalanan kembali ke Jakarta. Saat itu, Subardjo dan kawan-kawannya mencari dua kelompok dengan perspektif yang berlawanan meskipun sudah membuat persiapan sendiri. Laksamana Angkatan Laut Maeda menawarkan dukungan dan bahkan membiarkan para pemimpin Indonesia bertemu di rumahnya di Jalan Imam Bonjol. Sukarni mengutarakan rencana strategi pemberontakan pada malam itu juga telah dibuat untuk mendukung pelaksanaan proklamasi pada pertemuan yang diadakan di rumah sang Maeda. Laksamana Maeda memberikan saran untuk mengambil tindakan yang dapat mencegah pemberontakan semacam itu. Karena demikian dapat menghentikan pernyataan itu. Sehingga Para pemimpin Indonesia akan ditangkap oleh tentara militer Jepang. Kemudian sebuah pertemuan diadakan untuk menggagalkan rencana pemberontakan. Soekarno mengatakan di awal pertemuan itu bukan pertemuan PPKI melainkan pertemuan delegasi nasional Indonesia. Soekarno, Hatta, Achmad Subardjo, Sukarni, dan Sayuti Melik semua duduk di meja yang sama untuk pembicaraan. Sukarni hadir berperan sebagai juru bicara pemuda.

Panitia persiapan, pemuda, dan tokoh lainnya bertemu untuk membahas isi dan penerapan proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Sikap bahwa pernyataan ini adalah urusan rakyat Indonesia saja dan tidak boleh ada kaitannya dengan Jepang dipertahankan oleh pihak Sukarni. Akibatnya, mereka tetap menolak saran panitia persiapan yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Jepang. Meski dibentuk oleh warga negara Jepang, Soekarno-Hatta tetap meyakini bahwa panitia ini adalah panitia pilihan terbaik untuk mewakili rakyat. Tokoh-tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subardjo. Setelah isi proklamasi disusun dengan baik, kemudian dibacakan untuk ditandatangani oleh semua yang hadir. Rapat saat itu menjadi tegang dan ramai karena kelompok dari pemuda saat itu tidak menyetujui bahwa semua yang hadir harus menandatangani proklamasi. Sukarni menutup dengan mengatakan bahwa cukup menandatangani dengan Soekarno dan Muhammad Hatta.

Akhirnya ditulis dan disumpah, Soekarno-Hatta mendeklarasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia. Setibanya di Jakarta, mereka mempertahankan kontak dengan Gunseikanbu (staf administrasi militer) dan mendapat konfirmasi bahwa pasukan Jepang hanya akan mengikuti perintah dari Sekutu untuk maju. Laksamana Maeda dan pihak Jepang lainnya terus ikut campur dalam perencanaan deklarasi kemerdekaan, tetapi para pemimpin Indonesia bersikeras bahwa itu akan terjadi malam itu. Naskah akhir proklamasi yang telah disepakati baik oleh golongan tua maupun golongan muda, diketik oleh Sayuti Melik, ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, dan keesokan harinya diproklamkan di Pegangsaan Timur No. 56 tanggal 16 Agustus 1945. Ada dua kali revisi dibuat saat itu oleh Sayuti Melik pada teks proklamasi pertama, frasa "atas nama negara Indonesia" harus digunakan sebagai pengganti "perwakilan bangsa Indonesia". Kata "tempo" diganti untuk kedua kalinya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada akhirnya dikumandangkan esok harinya pada pukul 10.00 WIB tanggal 17 Agustus 1945, dan kemudian dikumandangkan ke seluruh pelosok negeri. Pada pagi hari

tanggal 17 Agustus 1945 tidak ada proses pembacaan teks proklamasi dan pengibaran bendera Pusaka Pusaka Merah Putih. Semuanya dilakukan secara acak. Latief Hendradiningrat mengibarkan bendera pusaka secara tiba-tiba dan tanpa mengikuti protokoler (Innaman, 2019).

Aksi Demonstrasi Mahasiswa 1998

Peristiwa tahun 1998 menjadi hal yang penting dalam catatan sejarah Indonesia serta bukti nyata bahwa mahasiswa dan generasi muda adalah *agent of change* bagi bangsa ini. Indonesia yang pada masa itu sedang menghadapi krisis moneter dengan meningkatnya harga sembako dan turunnya mata uang rupiah. Krisis ini memberikan efek sosial yang buruk untuk bangsa ini. Mahasiswa dengan ketakutannya akan tidak bisa berkuliah lagi dikarenakan oleh faktor ekonomi yang semakin memburuk. Banyaknya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), dan semakin berkurangnya lapangan pekerjaan membuat keadaan masyarakat semakin riuh. Sejarah juga mengatakan bagaimana pemerintahan Soeharto yang otoriter serta banyaknya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) merajalela. Sistem Pemerintahan Soeharto yang telah berjalan hingga 31 tahun memberikan kejenuhan bagi bangsa terkhusus mahasiswa dan generasi muda karena banyaknya kasus pembungkaman yang terjadi pada era itu. Otoriter yang diperkuat dengan banyaknya larangan yang berlaku pada masa itu melemahkan posisi demokrasi bagi bangsa pada masa itu (Beno et al., 2022).

Banyak kasus-kasus yang terjadi pada masa Orde Baru yang melemahkan demokrasi Indonesia seperti terbatasnya kebebasan berpendapat, banyaknya Organisasi yang dipaksa tutup, operasi intelejen dimana-mana sehingga memberikan ketakutan bagi masyarakat untuk melawan pemerintahan. Ditambah lagi dengan diberlakukannya depolitisasi kampus melarang untuk terjadinya aktivitas politik didalam kampus. Dalam beberapa kasus juga banyak aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa namun dibubarkan secara brutal oleh para aparat, seperti tragedi Malari (1974) yang menyebabkan 11 orang tewas, dan 300 orang terluka (Agustina, 2014). Karena pemerintahan Soeharto dianggap tidak efisien lagi semakin banyak pemberontakan yang terus terjadi.

Pada awalnya bentuk keprihatinan mahasiswa hanya tertuang dalam diskusi terbuka yang dilakukan di lingkungan kampus saja dan hanya melibatkan sedikit mahasiswa. Diskusi terbuka terus dilakukan oleh kalangan mahasiswa untuk menyuarakan menyerukan tuntutan penurunan harga sembako, penimbunan barang agar dihentikan dan kebijakan ekonomi yang berpihak pada kepentingan rakyat. Aksi ini didorong oleh organisasi resmi yang ada di lingkup Universitas seperti SMPT (Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Banyak fakultas menyebut aksi ini sebagai bentuk moral yang diberlakukan oleh mahasiswa. Para civitas akademisi tampak ikut terlibat seperti mantan Rektor UI Prof. Dr. Mahar Mardjono, Dr. Sri Edi-Swasono, Prof. Dr. Selo Soemardjan, Prof. Dr. Emil Salim (UI), Prof. Dr. Oetomo (IPB), Prof. Dr. Ichlasul Amal (UGM), Dr. Pruhito (Unair), dan Prof. Dr. Iskandar Alisyahbana (ITB) dengan menandatangani pernyataan bersama, untuk mengajak seluruh perguruan tinggi, para cendekiawan, kelompok profesional, dan organisasi masyarakat agar mendukung gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa (Supriyanto, 2022).

Puncak kerusuhan pada era Orde Baru yaitu Mei 1998, dimulai pada 12 Mei 1998, di tengah krisis ekonomi dan keuangan yang melanda Indonesia, mahasiswa Universitas Trisakti melakukan demonstrasi damai menuntut reformasi politik. Demonstrasi tersebut menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. Namun, aksi yang awalnya berlangsung damai itu berakhir menjadi sebuah tragedi yang tragis ketika aparat keamanan menggunakan peluru tajam untuk membubarkan para mahasiswa yang sedang demonstrasi. Empat mahasiswa tewas tertembak: Eran Mulia Lesmana, Hafiddin Loyan, Hendriawan Sy, dan Heli Hertanto. Peristiwa yang dikenal dengan tragedi Trisakti ini menimbulkan kemarahan besar di kalangan masyarakat, khususnya kalangan pelajar. Ribuan mahasiswa di berbagai kampus di Indonesia melakukan aksi solidaritas untuk mengenang para korban yang dianggap sebagai simbol perjuangan reformasi. Meninggalnya mahasiswa Trisakti tak hanya menghebohkan civitas akademisi, namun juga memicu ketegangan sosial yang semakin memanas (Jubaedah, 2019).

Pada tanggal 13 dan 15 Mei 1998, terjadi kerusuhan besar-besaran di Jakarta dan banyak kota besar lainnya. Pemberontakan dimulai dengan aksi massa yang berujung pada anarki, antara lain pembakaran gedung, penjarahan toko, dan kekerasan terhadap komunitas Tionghoa. Pusat perbelanjaan dibakar, rumah-rumah rusak, dan ratusan orang kehilangan nyawa dalam kerusuhan tersebut. Kawasan Glodok adalah salah satu tempat terburuk di Jakarta. Peristiwa tersebut mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap krisis ekonomi, karena melonjaknya harga barang-barang kebutuhan pokok, dan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Tragedi ini juga menyoroti lemahnya perlindungan terhadap etnis minoritas Tionghoa, yang merupakan korban utama kerusuhan. Ketika situasi semakin memanas, pergerakan mahasiswa pun semakin intensif.

Pada tanggal 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi memutuskan menduduki gedung DPR/MPR di Jakarta. Mereka mendirikan tenda di halaman gedung dan mengadakan demonstrasi massal untuk menekan pemerintah. Selama tiga hari mahasiswa melakukan berbagai kegiatan akademisi seperti melakukan sidang rakyat, diskusi, dan orasi yang dilakukan secara bergantian bertujuan untuk menyampaikan aspirasi secara damai, mahasiswa meminta agar dilakukan reformasi secara menyeluruh, dimulai dari reformasi ekonomi untuk menanggulangi krisis, pembentukan pemerintahan yang bersih dan jujur, pengunduran diri Soeharto beserta dilakukannya pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Proses ini menarik perhatian nasional hingga kanca internasional dan menunjukkan tekad mahasiswa untuk melakukan perubahan. Selain mahasiswa, tokoh masyarakat, politisi, dan berbagai elemen militer mulai mendukung gerakan tersebut sehingga meningkatkan tekanan terhadap Presiden Soeharto.

Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya di istana. Dalam pidato singkatnya, ia mendelegasikan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J.Habibi. Keputusan ini merupakan puncak perjuangan gerakan reformasi dan mengakhiri 32 tahun era Orde Baru. Gerakan reformasi tahun 1998 tidak hanya menandai tonggak sejarah penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, namun juga menandai tonggak transformasi

sistem pemerintahan menuju era yang lebih transparan dan demokratis. Pengorbanan mahasiswa Trisakti dan perjuangan bangsa Indonesia masih dianggap sebagai simbol keberanian melawan penindasan dan ketidakadilan.

Politik Digitalisasi: Kemajuan Politik Mahasiswa

Politik digitalisasi merupakan suatu konsep yang menggambarkan bagaimana teknologi yang berkembang dapat digunakan, diatur, atau mempengaruhi aktivitas politik. Menurut *Manuel Castells* seorang sosiolog mengatakan dalam karyanya yang berjudul *The Rise Of The Network Society*, menyoroti bahwa digitalisasi dapat menciptakan masyarakat jaringan yang merubah cara kekuasaan politik bekerja. Ia beropini bahwa media digital adalah pentas publik baru yang dimana akan banyak isu-isu politik terjadi, sehingga memungkinkan siapa saja dapat berpartisipasi (Castells, 2010). Politik digitalisasi merupakan bentuk perkembangan bagi aktivitas politik mahasiswa. Melalui media sosial lingkaran diskusi politik semakin besar, fleksibilitas yang tinggi membuat siapa saja akan bisa tahu tentang isu-isu politik yang sedang hangat dibahas.

Marshall McLuhan (1962) dalam konsepnya yang bernama *global village* dalam kutipannya yang sangat relevan dengan kasus ini yaitu *The new electronic independence re-creates the world in the image of a global village*, memiliki makna yang sangat berkesan, beliau menjelaskan bahwa teknologi adalah sebuah perkembangan baru yang dapat membentuk kembali dunia dalam gambaran desa global dimana tidak ada lagi batasan ruang dan waktu, semua orang bisa terhubung secara fleksibel sehingga menciptakah dunia yang saling terhubung. Teknologi digital dapat menjadi fasilitas bagi mahasiswa dalam mengakses berbagai informasi terkhusus politik yang lebih luas dan mendalam. Dalam beberapa waktu terakhir, teknologi digital telah merubah hampir seluruh aspek kehidupan politik. Terutama peran bagi mahasiswa yang dianggap menjadi agen pembawa perubahan sosial, digitalisasi telah banyak membuka peluang untuk pemberdayaan politik bagi mahasiswa, yang bersifat efektif, partisipatif, dan inklusif.

Pada tanggal 22 Agustus 2024, isu politik menyebar luas terkait revisi UU No. 10 Tahun 2016, Pasal 7 ayat (2) yang dimana dalam Undang-undang itu membahas terkait batasan umur calon pemimpin daerah yang akan berkompetisi dalam kontestasi politik Pilkada 2024. Pasal ini mencantumkan persyaratan usia minimum calon yang awalnya ditetapkan pada usia 30 tahun saat penetapan, DPR RI mengajukan revisi kepada Mahkamah Konstitusi agar batasan umur itu diubah menjadi 30 tahun saat pelantikan. Kasus ini mengundang banyak perhatian publik. Gerakan politik digitalisasi membuat isu ini semakin menyebar luas, terkhusus para mahasiswa dan generasi muda yang mengambil langkah politik digitalisasi ini untuk melakukan diskusi serta aksi protes melalui media sosial seperti Instagram, Tiktok, Youtube, dan Facebook, dimana mereka banyak memposting gambar peringatan darurat yang sama seperti gambar pada tahun 1998 (Tokan et al., 2024).



Gambar 3. Peringatan Darurat Penolakan Revisi UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2)

Gambar diatas yang diposting oleh salah satu tokoh public, seorang komedian muda yang ikut dalam partisipasi aksi protes melalui media instgram pada tanggal 21 Agustus 2024. Unggahan tersebut berhasil menjadi symbol kekuatan digitalisasi dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik, terutama dikalangan mahasiswa. Dengan lebih dari 340 ribu tanda suka dan ribuan komentar, postingan ini menunjukkan bahwa media social telah menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan pesan politik kepada khalayak luas. Dengan aksi protes ini memberikan dampak yang cukup luas sehingga dapat mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak revisi UU No, 10 Tahun 2006 ini (Ginting et al., 2024).

Dalam konteks politik digitalisasi, postingan seperti ini mencerminkan bagaimana teknologi digital memberikan setiap individu atau tokoh public untuk berperan sebagai gerakan perubahan. Bintangemon, sebagai figure muda dengan daya tarik kuat di media social, mampu menginspirasi mahasiswa dan generasi muda untuk lebih peka terhadap isu-isu politik dan berkontribusi secara aktif dalam berbagai bentuk aksi, terkhusus protes terhadap revisi Undang-undang. Hal ini sejalan dengan konsep *global village*, dimana setiap individu dapat memberikan kontribusinya tanpa ada batasan ruang dan waktu. Setiap elemen kehidupan memiliki hak yang sama dalam menerima informasi terkait isu-isu yang beredar dilingkungan masyarakat saat ini, sehingga menciptakan dunia paralel yang memudahkan siapa saja mengetahui tentang dunia eksternal. Aktivitas politik digitalisasi seperti inilah yang menjadi bentuk kemajuan dalam partisipasi politik mahasiswa dan generasi

muda, sehingga memberikan ruang diskusi baru yang jauh lebih fleksibel dan memberikan suasana yang baik tanpa ada aksi perusakan fasilitas publik (Juwandi et al., 2019).

Pada kontestasi politik PILKADA 2024, penggunaan mediasi digital dalam berpolitik semakin meningkat. Para calon kandidat kepala daerah banyak memilih melakukan kampanye melalui media sosial. Keterlibatan politik mahasiswa dan generasi muda dalam kampanye digital Pilkada 2024 tampak sangat menjanjikan untuk membuka ruang diskusi politik yang inklusif dan hidup. Dengan adanya platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan TikTok, mahasiswa tidak hanya menerima informasi, melainkan juga menciptakan konten yang berperan dalam menginspirasi narasi politik yang bijak dan mendidik. Mereka senantiasa menghasilkan konten kreatif seperti infografis, video pendek, dan pembahasan daring yang membicarakan profil kandidat, rencana kerja, serta isu-isu lokal yang penting (Ginting et al., 2024).

Di samping itu, para generasi muda turut memanfaatkan media sosial sebagai wadah untuk mengerahkan gerakan digital, seperti penggunaan tagar (#) kampanye yang mencuat untuk memberikan dukungan kepada calon dengan visi progresif. Gerakan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran politik di kalangan pemilih muda, tetapi juga turut berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses politik dengan memberikan kritik langsung kepada kandidat melalui kolom komentar atau diskusi terbuka.

Selain itu, mahasiswa turut berperan sebagai relawan kampanye digital yang membantu kandidat sampai ke berbagai lapisan masyarakat dengan cara yang lebih akrab dan interaktif. Dengan mengadakan webinar, siaran langsung, dan ruang obrolan daring, mereka memfasilitasi komunikasi dua arah antara kandidat dan masyarakat, yang secara efektif memperkuat hubungan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap jalannya proses politik. Langkah ini mencerminkan perubahan besar dalam partisipasi politik dari cara konvensional ke pendekatan yang lebih modern berbasis teknologi (Syahputri & Katimin, 2024).

Dari dua contoh kasus tersebut membuktikan bahwa dengan politik digitalisasi ini adalah bentuk kemajuan dalam partisipasi politik mahasiswa, menciptakan lingkungan baru tanpa ada batasan dan hambatan. Clay Shirky seorang ahli media digital dalam karyanya yang berjudul *Here Comes Everybody* ia mengatakan bahwa teknologi digital telah menurunkan biaya mobilisasi politik, membuat gerakan social lebih muda muncul, tetapi juga menciptakan tantangan dalam mempertahankan konsistensi dan tujuan (Shirky, 2008). Beliau menjelaskan bagaimana fleksibilitasnya ruang media untuk menciptakan lingkungan baru dan mudah diakses oleh siapa saja dan dimana saja. Namun dibalik kemajuan ini semua pasti terdapat tantangan yang menjadikan kemunduran dalam partisipasi politik mahasiswa dan generasi muda saat ini.

Bentuk Kemunduran Perilaku Politik Mahasiswa Dan Gen-Z

Dibalik ada kemajuan pasti ada kemunduran, hal ini selaras dengan kondisi perilaku politik mahasiswa dan generasi muda saat ini. Banyak juga isu-isu meluas bagaimana mahasiswa kurang peduli terhadap kondisi politik di Indonesia. Dalam catatan sejarah Indonesia, mahasiswa telah dikenal sebagai *agent of change* karena

memiliki peran yang besar dalam berbagai momentum terkhusus politik, mulai dari perjuangan kemerdekaan hingga masa reformasi tahun 1998. Namun, seiring berjalannya waktu, peran tersebut terlihat mulai memudar. Gen-Z kini lebih fokus pada ranah digital dan gaya hidup individualis, sehingga banyak juga terjadi pengabaian tanggung jawab kolektif terhadap isu-isu politik. Hal ini memunculkan kekhawatiran tentang kemunduran politik mahasiswa dan generasi muda yang mengancam keberlanjutan demokrasi dan kualitas partisipasi politik dimasa mendatang. Ada beberapa bentuk kemunduran yang dihadapi mahasiswa dan generasi muda dalam berpartisipasi politik saat ini yaitu:

1. Rendahnya Literasi Politik Mahasiswa dan Gen-Z

Kondisi literasi politik di kalangan mahasiswa dan Gen-Z menunjukkan tanda-tanda kemunduran yang mengkhawatirkan. Literasi politik, yang mencakup kemampuan memahami sistem politik, proses pengambilan keputusan, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, merupakan fondasi penting dalam membangun partisipasi aktif generasi muda dalam demokrasi. Rendahnya tingkat literasi ini bukan hanya membatasi kemampuan mahasiswa dan Gen-Z untuk terlibat secara kritis, tetapi juga berpotensi mengancam keberlanjutan demokrasi di masa depan (Al Faza & Lestari, 2020).

Menurut Najwa Shihab, generasi muda saat ini sering terjebak pada narasi populis atau informasi yang kurang mendalam terkait isu politik. Hal ini diperburuk oleh kurangnya akses pada informasi berkualitas serta rendahnya minat untuk memahami isu-isu politik secara lebih serius. Pendapat ini didukung oleh Yudi Latif, yang menekankan pentingnya pendidikan politik sebagai alat untuk membangun generasi yang mampu berkontribusi dalam pengambilan keputusan strategis bangsa (Putri, 2017).

Selain itu, M. Qodari menyoroti bahwa rendahnya literasi politik dapat dilihat dari rendahnya tingkat partisipasi generasi muda dalam pemilu maupun kegiatan politik lainnya. Hal ini menandakan kurangnya kesadaran akan pentingnya peran politik dalam menentukan masa depan bangsa. Sebagai tambahan, Anies Baswedan menegaskan bahwa pendidikan formal maupun informal harus berperan aktif dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya melek politik, tetapi juga memiliki kapasitas untuk memimpin perubahan.

Pentingnya meningkatkan literasi politik mahasiswa dan Gen-Z tidak dapat diabaikan. Upaya ini harus mencakup peningkatan akses terhadap pendidikan politik yang inklusif, penyediaan ruang diskusi publik yang berkualitas, serta mendorong keterlibatan aktif generasi muda dalam kegiatan politik berbasis pengetahuan. Dengan demikian, generasi ini tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor perubahan dalam membangun demokrasi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dampak dari rendahnya literasi politik ini akan menghasilkan banyak sikap-sikap negatif dilingkungan mahasiswa dan generas muda, seperti:

1) Sikap Apatisme Terhadap Politik

Apatisme terhadap politik adalah sikap ketidakpedulian atau kurangnya ketertarikan seseorang terhadap isu-isu politik, proses pemilu, atau keterlibatan dalam aktivitas politik. Sikap apatisme ini merupakan sikap yang paling banyak ditemukan dalam lingkungan mahasiswa dan generasi muda saat ini. Kurangnya aktivitas literasi

politik merupakan salah satu penyebab mahasiswa sekarang ini kurang dalam berpartisipasi politik. Sikap apatisisme ini menunjukkan bagaimana mahasiswa dan generasi muda saat ini yang tidak peduli terhadap calon pemimpin yang akan dipilih, ditambah lagi dengan kerasnya tuntutan akademik mahasiswa membuat mereka semakin menghilangkan ketertarikannya terhadap dunia politik dan lebih memilih untuk fokus terhadap diri sendiri. Mahasiswa dan generasi muda berpendapat bahwa politik bukanlah hal yang penting dalam kehidupan mereka. Mereka beranggapan bahwa keterlibatan politik langsung tidak mempengaruhi kehidupan mereka secara signifikan, dan berpendapat bahwa faktor ekonomi dan sosial memiliki dampak lebih besar dalam kehidupan sehari-hari. Penyebab-penyebab ini menandakan bahwa masih banyak orang kurang paham dalam politik atau disebut rendahnya minat literasi politik (Muliono & Nasuhaidi, 2024).

2) Sikap FOMO (*Fear Of Missing Out*)

Sikap Fear of Missing Out (FOMO) yang dimiliki oleh banyak mahasiswa dalam konteks politik dapat dikaitkan dengan rendahnya literasi politik. Mahasiswa sering kali mengikuti aksi politik, seperti demonstrasi atau kegiatan advokasi lainnya, bukan didasari oleh pemahaman yang mendalam terkait isu politik yang diperjuangkan, melainkan karena dorongan sosial. Ketakutan untuk "tertinggal" dari teman-temannya atau terlihat tidak peduli terhadap isu tertentu mendorong mahasiswa untuk ikut serta tanpa memahami kepentingan dari isu yang diperjuangkan. Sehingga mengakibatkan aksi politik yang dilakukan sering kali tidak efektif atau bahkan kontraproduktif. FOMO, menurut Andrew Przybylski, adalah perasaan cemas karena takut kehilangan pengalaman yang dirasakan orang lain. Dalam konteks ini, mahasiswa yang memiliki FOMO lebih termotivasi untuk bergabung dalam aksi politik sebagai cara untuk tetap relevan di lingkungan sosialnya. Sayangnya, keterlibatan ini tidak disertai dengan pemahaman akan dampak atau tujuan dari aksi politik tersebut. Lebih jauh, Patrick J. McGinnis, pencetus istilah FOMO, menjelaskan bahwa FOMO muncul dari pilihan yang berlebihan dalam kehidupan modern. Hal ini relevan dengan mahasiswa yang dihadapkan pada berbagai isu politik tanpa memiliki bekal literasi politik yang cukup untuk memilah isu mana yang penting dan relevan bagi mereka. Cal Newport menambahkan bahwa ketergantungan pada media sosial memperburuk FOMO, karena mahasiswa sering kali terpapar unggahan-unggahan yang mempromosikan aksi politik sebagai sesuatu yang trendy atau "wajib diikuti." Akibatnya, mereka cenderung lebih peduli pada bagaimana aksi tersebut terlihat di media sosial daripada dampak riilnya. Fenomena ini sering kali berujung pada aksi politik yang sekadar mengikuti arus tanpa arah yang jelas. Sebagai contoh, demonstrasi yang diikuti oleh mahasiswa sering kali berubah menjadi aksi kekerasan, seperti perusakan fasilitas umum, tanpa memahami substansi isu yang diperjuangkan. Sherry Turkle, seorang profesor MIT, menggambarkan FOMO sebagai gejala budaya digital yang terlalu terhubung, tetapi secara emosional terisolasi. Hal ini menjelaskan bagaimana mahasiswa bisa begitu mudah tergiring untuk ikut aksi politik, namun tidak memiliki ikatan emosional yang mendalam terhadap isu yang diadvokasikan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi politik di kalangan mahasiswa. Literasi politik tidak hanya mencakup pemahaman terhadap konsep-konsep dasar politik, tetapi juga kemampuan untuk menganalisis isu-isu politik secara kritis. Dengan literasi politik yang baik, mahasiswa

tidak akan terjebak dalam sikap FOMO, melainkan mampu berpartisipasi dalam politik secara bijaksana dan bermakna. Dengan demikian, rendahnya literasi politik menjadi akar dari sikap FOMO dalam politik mahasiswa, yang berdampak pada aksi-aksi politik yang tidak produktif. Upaya untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap isu politik adalah langkah penting untuk membangun partisipasi politik yang lebih konstruktif dan bertanggung jawab (*Generasi Muda Dan FOMO Politik: Kekuatan Baru Untuk Bersuara, 2024*).

2. Gerakan Politik Uang Mahasiswa Dan Generasi Muda

Dalam dinamika politik Indonesia, mahasiswa dan generasi muda selalu dianggap sebagai aktor perubahan yang memiliki potensi besar untuk memengaruhi arah kebijakan dan pembangunan negara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul fenomena yang memprihatinkan terkait perilaku politik mereka, khususnya yang berkaitan dengan politik uang. Fenomena ini tidak hanya mencoreng nilai-nilai idealisme yang seharusnya dijunjung tinggi oleh mahasiswa, tetapi juga mengarahkan generasi muda pada praktik politik yang pragmatis dan jauh dari etika. Topik ini akan mengeksplorasi berbagai bentuk politik uang yang melibatkan mahasiswa, mulai dari peran mereka sebagai buzzer politik, peserta demonstrasi berbayar, hingga menjadi bagian dari tim sukses kampanye politik.

Salah satu bentuk keterlibatan mahasiswa dalam politik uang adalah melalui peran mereka sebagai buzzer politik. Buzzer politik merupakan buzzer yang memiliki motif untuk menaikkan isu-isu politik dengan tujuan menguntungkan pihak tertentu dalam berpolitik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh CIPG pada 2017, penggunaan buzzer bermula pada tahun 2009 yang berguna untuk kepentingan brand dalam melakukan promosi. Hingga akhirnya pada 2012 buzzer mulai digunakan untuk kepentingan politik yaitu pencitraan. Buzzer politik digunakan secara luas untuk kepentingan politik pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017. Kemudian digunakan kembali pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Buzzer politik merupakan salah satu kunci kesuksesan daripada calon kepala daerah atau kepala negara agar kelak dapat terpilih. Tidak hanya berfungsi untuk marketing, buzzer politik juga memiliki fungsi untuk menjatuhkan dan membuat paras lawan politik terlihat buruk didepan publik. Dengan fungsi seperti ini buzzer menjadi roda penggerak utama dalam marketing dan juga kampanye hitam (black campaign). Peran buzzer dalam menggagal persepsi publik pada saat kontestasi politik sejatinya menjadi sebuah fenomena global

Keberadaan buzzer politik pada media sosial mempengaruhi demokrasi Indonesia dengan cara berperan dalam menggiring opini publik. Dengan adanya penggiringan opini publik, akan mempengaruhi karakteristik dan jiwa dari demokrasi itu sendiri yakni kebebasan berekspresi dan berpendapat yang sejalan dengan Pasal 28. dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Selain itu, kebebasan memilih dalam pemilu juga akan berpengaruh terhadap masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam demokrasi

Untuk menjaga demokrasi dan keadilan pemilu, perlu adanya regulasi yang ketat terkait praktik buzzer politik. Langkah-langkah seperti transparansi dalam kampanye politik, penegakan hukum terhadap ujaran kebencian, dan pengawasan

terhadap media sosial dapat membantu mengurangi dampak negatif buzzer politik dalam pemilihan.

Efektivitas Kebijakan dan regulasi berperan penting dalam mengendalikan dinamika buzzer politik di media sosial. Pemerintah dapat memberlakukan undang-undang atau peraturan yang mengatur praktik buzzer politik di media sosial, seperti pelarangan pembayaran buzzer politik atau memastikan bahwa informasi politik yang disebarakan harus terverifikasi. Pemerintah juga dapat memastikan bahwa platform media sosial harus memenuhi standar etika yang ketat dalam menjaga integritas dan netralitasnya. Di era digital, banyak mahasiswa yang disewa oleh aktor politik untuk menyebarkan propaganda atau membentuk opini publik di media sosial. Dengan bayaran tertentu, mereka diarahkan untuk mengamplifikasi pesan-pesan politik yang sering kali tidak berbasis fakta, tetapi bertujuan untuk menyerang lawan politik atau mempromosikan kandidat tertentu. Fenomena ini menunjukkan bagaimana politik uang dapat memanipulasi independensi mahasiswa, menjadikan mereka alat untuk kepentingan elite politik (Daeni et al., 2023).

Selain sebagai buzzer, politik uang juga terlihat dalam fenomena demonstrasi berbayar, dalam agama juga ada larang bahwa suap dan politik uang tidak di bolehkan لِزَاثِيٍّ وَالْمُرْتَشِيٍّ فِي النَّارِ. Mahasiswa yang seharusnya turun ke jalan untuk memperjuangkan isu-isu yang relevan dan berbasis kepentingan rakyat, kini sering kali terlibat dalam aksi demonstrasi dengan motivasi uang saku. Demonstrasi ini sering kali digerakkan oleh kelompok tertentu yang memiliki agenda politik, menjadikan aksi mahasiswa kehilangan nilai perjuangan moralnya. Iming-iming kompensasi finansial menciptakan generasi muda yang lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada integritas perjuangan mereka.

Praktik lain dari politik uang adalah keterlibatan mahasiswa dalam tim sukses kampanye politik. Dengan dalih memberikan pengalaman praktis dalam dunia politik, banyak mahasiswa direkrut untuk mendukung kampanye kandidat tertentu. Sayangnya, keterlibatan ini sering kali hanya didasarkan pada motivasi finansial, bukan karena keyakinan pada visi dan misi kandidat tersebut. Mahasiswa yang menjadi sasaran empuk dalam politik uang ini mencerminkan lemahnya literasi politik mahasiswa dan generasi muda, sehingga mereka lebih mudah tergoda oleh keuntungan jangka pendek (Roy et al., 2019).

Fenomena politik uang yang melibatkan mahasiswa dan generasi muda ini mengindikasikan krisis moral dan idealisme dalam kehidupan politik mereka. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa seharusnya mampu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan politik yang bersih dan berintegritas. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi politik yang memadai dan menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab sejak dini agar mahasiswa tidak mudah terjerumus dalam praktik politik uang yang merugikan masa depan bangsa.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Mahasiswa dan generasi muda telah menjadi aktor penting dalam sejarah politik Indonesia, mulai dari perjuangan kemerdekaan, reformasi 1998, hingga partisipasi dalam era digitalisasi politik saat ini. Artikel ini menyoroti bahwa meskipun mereka memiliki potensi besar untuk membawa perubahan, ada tantangan serius yang menghambat peran strategis tersebut.

Salah satu masalah utama yang dibahas adalah rendahnya literasi politik. Banyak mahasiswa dan generasi muda tidak memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu politik, kebijakan publik, dan dinamika global, sehingga partisipasi mereka cenderung bersifat reaktif dan kurang kritis. Rendahnya literasi ini juga memicu sikap apatis terhadap pemilu, di mana banyak dari mereka tidak tertarik untuk memilih atau bahkan memilih golput. Selain itu, fenomena politik uang dan tren Fear of Missing Out (FOMO) dalam aksi politik mencerminkan degradasi nilai idealisme mahasiswa, di mana mereka terlibat dalam aksi hanya untuk kepentingan finansial atau tekanan sosial tanpa pemahaman yang memadai.

Namun, artikel ini juga menyoroti peluang besar dari era digitalisasi. Teknologi telah membuka ruang diskusi yang lebih fleksibel dan memungkinkan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam isu-isu politik dengan cara yang lebih kreatif dan inklusif. Digitalisasi politik juga memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi melalui media sosial, meskipun hal ini tetap membutuhkan pengawasan agar tidak jatuh ke dalam praktik manipulasi, seperti penggunaan buzzer politik.

Melalui analisis ini, menegaskan pentingnya peningkatan literasi politik generasi muda untuk memastikan mereka dapat menjadi agen perubahan yang efektif. Pendidikan politik yang inklusif, akses terhadap informasi yang kredibel, dan pembentukan budaya diskusi yang sehat sangat diperlukan. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor yang mampu membawa Indonesia menuju demokrasi yang lebih matang, produktif, dan bermartabat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abda' u, F. (2022). *Rengasdengklok dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia*. UIN Sunan Gunung Djati.
- Agustina, W. (2014). *Massa Misterius Malari: Rusuh Politik Pertama dalam Sejarah Orde baru*. Tempo Publishing.
- Al Faza, F., & Lestari, P. (2020). Sikap Apatis Pemuda terhadap Politik di Dusun Mekarsari Desa Kalibeber Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo. *Unnes Political Science Journal*, 4(2), 51-54. <https://doi.org/10.15294/upsj.v4i2.26219>
- Beno, J., Silen, A. P., & Yanti, M. (2022). GERAKAN MAHASISWA DALAM UPAYA KEJATUHAN PEMERINTAH SOEHARTO 1998. *Braz Dent J.*, 33(1), 1-12. <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jii.v1i2.15>
- Castells, M. (2010). *The Rise of The Network Society*. Wiley-Blacwell.
- Daeni, F. I. M., Rachmarani, F. A., & Rhiza, I. (2023). Pengaruh Buzzer Politik Dalam Pemilu: Tantangan Terhadap Electoral Justice Dalam Mempertahankan Prinsip Demokrasi. *Padjadjaran Law Review*, 11(2), 183-200.
- Ester Indahyani Jusuf, Hotma Timbul, Olisias Gultom, S. F. (2007). *KERUSUHAN MEI 1998: FAKTA, DATA DAN ANALISA mengungkap kerusakan Mei 1998 Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan* (R. R. Simanjorang, Ed.; pertama). Solidaritas Nusa Bangsa, Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.

- Friskha, S., Gultom, O., & Jusuf, E. I. Y. (2007). *Kerusuhan Mei 1998 Fakta, Data & Analisa: Mengungkap Kerusuhan Mei 1998 Sebagai Kejahatan terhadap Manusia*. Solidaritas Nusa Bangsa.
- Generasi Muda dan FOMO Politik: Kekuatan Baru untuk Bersuara*. (2024). KPK.Go.Id.
- Ginting, D. T. N., Tan, T., Alex, A., Nurlaila, N., Gultom, S. N., Cindy, C., Tan, C., Valencia, C., Ronaldo, D., Maulana, F. H., Gabriella, G., Al Islami, G., Aurelia, J., Jeny, J., Alexander, M., Sherryne, S., Wong, S., Thresdianto, T., & Wijaya, V. (2024). Pengaruh Media Sosial dalam Kampanye Politik terhadap Hasil Pemilu. *Dedikasi Sains Dan Teknologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 123-130. <https://doi.org/10.47709/dst.v4i2.4590>
- Jubaedah, S. (2019). Gerakan Mahasiswa (Kajian tentang Peranan Mahasiswa Universitas Trisakti pada Mei 1998 dalam Proses Pergantian Kekuasaan Orde Baru). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8(2), 18-40. <https://doi.org/10.36706/jc.v8i2.9245>
- Juwandi, R., Nurwahid, Y., & Lestari, A. (2019). Media Sosial sebagai Sarana Pendidikan Politik untuk Mengembangkan Literasi Digital Warga Negara. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*, 2(1), 369-378.
- Lampus, C. M., Lopian, M. T., & Sondakh, E. (2022). Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di kecamatan Wanea. *Jurnal Eksekutif*, 2(3).
- Lutfi, F. M., & Nurjaman, A. (2022). Keterlibatan Sukarni dalam Peristiwa Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Tahun 1945. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 139-149.
- Muliono, M., & Nasuhaidi, N. (2024). Gerakan Sosial Anak Muda dalam Proses Demokrasi Elektoral 2024: Studi Gerakan Protes atas Politik Dinasti. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(4), 307-313.
- Innaman, M. H. (2019). *Peranan Ahmad Soebardjo dalam Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada Tahun 1945*. Universitas Jember.
- Pakpahan, A. F., Nugraha, D. M., El Faizah, H., Maheswari, L. L., Rasyid, M. N., Azahra, S. Z., & Rismawati, Y. (2024). Pengaruh FoMO (Fear of Missing Out) dalam Perspektif Gen Z terhadap Pesta Demokrasi 2024. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 2(1), 168-174.
- Putri, N. E. (2017). Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(1).
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Grasindo.
- Rojaby, U. D. (2018). Apatisme Generasi Milenial Terhadap Politik. *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*.
- Roy, M., Ekoodoh, E. E., & Suraya, R. S. (2019). Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilihan Calon Anggota Legislatif. *KABANTI: Jurnal Kerabat Antropologi*, 3(2), 80-96.
- Shirky, C. (2008). *Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations* (1st ed.). Penguin Group.
- Supriyanto, S. (2022). Gerakan Mahasiswa dalam Upaya Kejatuhan Pemerintah Soeharto 1998. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(2), 66-74. <https://doi.org/10.58344/jii.v1i2.15>

- Syahputri, I. B., & Katimin, K. (2024). Pengaruh Aktivis Mahasiswa dalam Perubahan Sosial Politik di Era Digital 5.0. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(4), 25–36. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i4.3490>
- Tokan, C. F., Andriani, P., Ang, S., & Prianto, Y. (2024). Penanganan Demonstran pada Aksi Mengawal Putusan MK di Jakarta. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(3), 368–380.
- Yulistiyono, A., Gunawan, E., Widayati, T., Firmansyah, H., Malau, N. A., Megaster, T., Ekopriyono, A., Nurhayati, T. P. T., Siahaan, A. L. S., & Suharno, S. (2021). *Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi* (Vol. 1). Penerbit Insania.